

## Nahdlatul Ulama (NU) in Central Sumatra During the PRRI Period (1958-1961)

Muhammad Yunus<sup>1</sup>, Zulqayyim<sup>2</sup>, Yusmarni Djalius<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Andalas, Indonesia

### ABSTRACT

This study aims to analyze the development of Nahdlatul Ulama (NU) in Central Sumatra and the organization's political stance in responding to the Revolutionary Government of the Republic of Indonesia (PRRI) conflict in the late 1950s. It also seeks to explain the dynamics of NU's relationship with regional political elites and the central government, as well as the impact of the PRRI conflict on the development of NU in West Sumatra. This research employs the historical method, consisting of four main stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings indicate that Nahdlatul Ulama (NU) began to develop organizationally in Central Sumatra in the early 1950s through the efforts of several prominent figures, some of whom originated from the Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) milieu. Although NU secured only limited electoral support in the 1955 General Election, the organization remained actively involved in regional political affairs. During the initial phase of the PRRI conflict, NU supported the Dewan Banteng; however, it subsequently aligned itself with the central government's policy when the conflict evolved into an armed rebellion against Jakarta. Following the end of the PRRI conflict, administrative restructuring and organizational reorganization contributed to the strengthening of NU at the regional level. During the Guided Democracy period, NU experienced significant growth through the expansion of its organizational network, an increase in membership, and greater participation in political institutions. These developments demonstrate the close relationship between the evolution of religious organizations and broader political transformations at both the regional and national levels.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) di Sumatera Tengah serta sikap politik organisasi tersebut dalam menghadapi konflik Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada akhir dekade 1950-an. Kajian ini juga berupaya menjelaskan dinamika hubungan NU dengan elite politik daerah maupun pemerintah pusat serta dampak konflik PRRI terhadap perkembangan organisasi NU di Sumatera Barat. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) mulai berkembang secara organisatoris di Sumatera Tengah sejak awal 1950-an melalui peran tokoh-tokoh yang sebagian berasal dari lingkungan Perti. Meskipun perolehan suara NU pada Pemilu 1955 masih terbatas, organisasi ini tetap aktif dalam dinamika politik daerah. Pada awal konflik PRRI, NU mendukung Dewan Banteng, tetapi kemudian mengikuti kebijakan pusat dengan berpihak kepada pemerintah Indonesia ketika konflik berubah menjadi pemberontakan. Setelah PRRI berakhir, perubahan administratif dan reorganisasi kepengurusan mendorong penguatan NU. Pada masa Demokrasi Terpimpin, NU berkembang melalui perluasan jaringan, peningkatan anggota, dan keterlibatan politik, mencerminkan keterkaitan erat antara perkembangan organisasi keagamaan dan perubahan politik.

### Keywords

Central Sumatra, Nahdlatul Ulama, PRRI

### Article History

Received: 2026-04-16  
Accepted: 2026-06-13  
Published: 2026-06-14

### Contact

[nuhyunus5@gmail.com](mailto:nuhyunus5@gmail.com)

### Kata Kunci

Nahdlatul Ulama, PRRI, Sumatera Tengah



## Pendahuluan

Situasi politik Indonesia pada akhir dekade 1950-an ditandai dengan meningkatnya ketegangan antara pemerintah pusat dan sejumlah daerah di luar Jawa. Ketegangan tersebut muncul akibat berbagai persoalan politik dan ekonomi yang berkembang sejak masa demokrasi parlementer. Sejumlah elite daerah menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat sepenuhnya memperhatikan kepentingan daerah, terutama terkait dengan distribusi sumber daya, pembangunan ekonomi, serta representasi politik dalam pemerintahan nasional. Ketidakpuasan tersebut semakin menguat seiring dengan tuntutan otonomi daerah yang lebih luas, yang pada akhirnya melahirkan berbagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat (Bemmelen, 2011)

Salah satu peristiwa penting yang mencerminkan konflik antara pusat dan daerah tersebut adalah berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958 di Sumatera Tengah. Gerakan ini dipelopori oleh sejumlah tokoh militer dan sipil yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Dalam perkembangannya, PRRI tidak hanya menjadi gerakan politik daerah, tetapi juga berkembang menjadi konflik bersenjata antara pemerintah pusat dan kelompok pemberontak di berbagai wilayah Sumatera. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu episode penting dalam sejarah politik Indonesia pada masa demokrasi liberal (Wiyatmi, 2013)

Konflik PRRI tidak hanya melibatkan aktor-aktor militer dan elite politik, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat di daerah. Dalam konteks masyarakat Sumatera Tengah, organisasi-organisasi sosial keagamaan memiliki peran yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial dan politik. Organisasi Islam tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi wadah mobilisasi sosial serta memiliki pengaruh dalam dinamika politik lokal. Oleh karena itu, sikap dan posisi organisasi-organisasi Islam terhadap konflik PRRI menjadi aspek penting yang perlu dikaji untuk memahami dinamika politik daerah pada masa tersebut (Asnan, 2007)

Salah satu organisasi Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi ini didirikan pada tahun 1926 oleh para ulama tradisional yang berupaya mempertahankan ajaran *Ahlussunnah wal-Jama'ah* di tengah berkembangnya berbagai gerakan reformisme Islam. Dalam perkembangannya, NU tidak hanya menjadi organisasi keagamaan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam dinamika politik nasional. Perubahan terjadi pada tahun 1952 ketika NU memutuskan untuk keluar dari Partai Masyumi dan membentuk partai politik sendiri. Keputusan tersebut menandai keterlibatan NU secara lebih langsung dalam arena politik nasional maupun daerah (Marijan, 1992).

Di wilayah Sumatera Tengah, kehadiran NU secara organisatoris mulai berkembang pada awal dekade 1950-an. Meskipun demikian, secara ideologis paham *Ahlussunnah wal-Jama'ah* sebenarnya telah lama berkembang di Minangkabau melalui jaringan ulama tradisional yang dikenal sebagai kelompok Kaum Tua (Koto, 1997). Kehadiran NU di wilayah ini kemudian membawa dinamika baru dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Minangkabau yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh organisasi Islam lain seperti Muhammadiyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Dalam konteks ini, NU tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga menjadi salah satu aktor dalam dinamika politik lokal.

Ketika konflik PRRI muncul pada akhir 1950-an, organisasi-organisasi Islam di Sumatera Tengah berada dalam situasi yang kompleks. Mereka harus menentukan sikap politik di tengah konflik antara pemerintah pusat dan elite daerah. Bagi NU, situasi ini menjadi semakin rumit karena organisasi tersebut memiliki keterkaitan dengan dinamika politik nasional, sekaligus harus berhadapan dengan realitas politik lokal di daerah. Oleh karena itu, sikap dan posisi NU dalam menghadapi konflik PRRI menjadi menarik untuk dikaji sebagai bagian dari dinamika hubungan antara organisasi keagamaan dan kekuasaan politik.

Kajian mengenai PRRI selama ini umumnya lebih banyak berfokus pada aspek militer dan konflik politik antara elite daerah dan pemerintah pusat. Beberapa penelitian menyoroti peran tokoh-tokoh militer serta dinamika politik regional yang melatarbelakangi munculnya gerakan tersebut. Namun demikian, peran organisasi sosial keagamaan dalam dinamika konflik PRRI masih relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian historiografi. Padahal, organisasi-organisasi tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk sikap masyarakat terhadap konflik politik yang terjadi.

Mestika Zed (1999, 2014), pada sejumlah penelitiannya menyoroti PRRI sebagai sebuah resistensi terhadap sentralisasi pengelolaan negara. Selain itu, ia juga menganalisis peristiwa PRRI berkaitan dengan hubungan antara pusat dengan daerah. central dengan periperhal. Begitu juga dengan kajian lainnya negara antara pusat dengan daerah. Sementara Lorenza et.al, (2024) mengulas penumpasan gerakan PRRI oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan adanya kajian yang membahas PRRI dan peran NU. Oleh karenanya maka kajian mengenai posisi dan peran NU di Sumatera Tengah pada masa konflik PRRI menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana dinamika organisasi NU di tingkat daerah, bagaimana sikap politik organisasi tersebut terhadap gerakan PRRI, serta bagaimana hubungan NU dengan pemerintah pusat maupun elite politik lokal pada masa konflik berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara organisasi keagamaan, dinamika politik daerah, dan konflik kekuasaan dalam sejarah Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan utama, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang relevan, baik berupa dokumen arsip, literatur sejarah, maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan perkembangan Nahdlatul Ulama dan peristiwa PRRI di Sumatera Tengah. Selanjutnya dilakukan kritik sumber untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber yang digunakan. Tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis dan menafsirkan berbagai data yang diperoleh untuk memahami dinamika peran Nahdlatul Ulama dalam konteks konflik PRRI. Hasil analisis tersebut kemudian disusun dalam bentuk historiografi atau penulisan sejarah yang sistematis dan kronologis. (Kuntowijoyo, 2003) Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-politik (Kartodirdjo, 1992), terutama untuk melihat bagaimana Nahdlatul Ulama sebagai

organisasi Islam berinteraksi dengan dinamika kekuasaan dan konflik politik di tingkat daerah.

## **Hasil dan Diskusi**

### **Kondisi Sosial-Politik Sumatera Tengah Menjelang PRRI**

Situasi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal (1950-1959) ditandai oleh ketidakstabilan politik yang cukup tinggi. Sistem parlementer yang diterapkan pada masa tersebut menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini berdampak pada lemahnya konsolidasi pemerintahan pusat dalam mengelola berbagai persoalan nasional, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Di berbagai wilayah luar Jawa, terutama di Sumatera dan Sulawesi, muncul berbagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak mampu mengakomodasi kepentingan daerah (Waridah, et.al, 2003)

Ketegangan antara pemerintah pusat dan elite daerah di Sumatera semakin meningkat pada pertengahan dekade 1950-an. Sejumlah tokoh militer dan sipil di daerah menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat cenderung bersifat sentralistik serta kurang memperhatikan pembangunan daerah. Selain itu, persoalan distribusi sumber daya ekonomi, terutama yang berkaitan dengan hasil ekspor daerah seperti karet dan minyak bumi, juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketidakpuasan tersebut. Elite daerah merasa bahwa kontribusi ekonomi daerah terhadap negara tidak diimbangi dengan pembangunan yang memadai di wilayah mereka (Leirissa, 1997).

Dalam konteks Sumatera Tengah, ketegangan tersebut kemudian melahirkan gerakan politik yang dikenal sebagai Dewan Banteng. Dewan Banteng dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein yang saat itu menjabat sebagai komandan militer di wilayah Sumatera Tengah. Gerakan ini pada awalnya bertujuan untuk menekan pemerintah pusat agar melakukan perbaikan dalam bidang politik dan ekonomi serta memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Melalui Dewan Banteng, elit militer dan sipil di Sumatera Tengah berupaya membangun kekuatan politik regional yang dapat menyeimbangkan dominasi pemerintah pusat.

Dinamika politik yang berkembang kemudian membawa gerakan tersebut ke arah yang lebih radikal. Ketegangan antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok militer daerah semakin meningkat, terutama setelah pemerintah pusat berupaya mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan kekuatan militer di daerah. Situasi ini akhirnya mendorong sebagian elit daerah untuk mengambil langkah yang lebih drastis dengan mendirikan pemerintahan tandingan terhadap pemerintah pusat. Puncak dari dinamika tersebut adalah diproklamasikannya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958 di Sumatera Tengah. Pemerintahan ini dipimpin oleh sejumlah tokoh militer dan sipil yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat serta menuntut adanya perubahan dalam sistem pemerintahan nasional. Deklarasi PRRI kemudian memicu konflik bersenjata antara pemerintah pusat dan kelompok pemberontak di beberapa wilayah Sumatera (Kahin, 2005)

Munculnya PRRI tidak hanya menjadi peristiwa politik yang penting dalam sejarah Indonesia, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat di daerah. Berbagai kelompok sosial, termasuk organisasi-organisasi

keagamaan, turut menghadapi dilema politik dalam menentukan sikap mereka terhadap konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan gerakan PRRI. Dalam konteks inilah dinamika sikap dan posisi organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama, menjadi bagian penting dalam memahami perkembangan politik di Sumatera Tengah pada masa tersebut.

### **Nahdlatul Ulama di Sumatera Tengah Sebelum PRRI**

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan yang berbasis Islam Tradisional. Organisasi ini berdiri, pada tanggal 31 Januari 1926, oleh beberapa ulama pesantren tradisional Jawa, di antaranya; KH. Hasyim Asyari, K.H Wahab Hasbullah beserta ulama lainnya. Nahdlatul Ulama, secara bahasa yang berarti kebangkitan ulama. Diharapkan dengan didirikannya kelompok ini dapat menjadikan para ulama tradisional menjadi bangkit ditengah marak hadirnya kelompok keagamaan pembaharu yang sering menyalahkan pemahaman mereka yang berhaluan *Ahlusunnah wal-Jamaah* dan memakai empat madzhab (Fealy, 2011:12)

Pada 1952, NU bertransformasi dari organisasi keagamaan menjadi partai politik. Setahun setelahnya, pada 1953, NU hadir di Sumatera Tengah. Pembentukan NU Sumatera Tengah, dimotori oleh beberapa tokoh, di antaranya: Syarkawi, Abu Al Ma'riji, Saudi Jaslef, Thaha Ma'ruf, A. Razak Tuanku Tanak Air. Rapat pembentukan ini diadakan pada 1953, di rumah Saridin Syarif di Bukittinggi. Para tokoh pendiri NU ini, merupakan orang-orang yang pada saat itu telah tergabung dalam organisasi PERTI. Mereka sepakat untuk mendirikan NU, berawal dari ketidakpuasan mereka hanya memakai satu mazhab saja, sebagaimana ajaran PERTI yang hanya berpegang teguh pada mazhab Syafi'i. Di balik itu, alasan politis tidak dapat dikesampingkan, karena NU pada masa itu telah berwujud partai politik (Ashadi, dkk, 2022: 139)

Pada pemilihan kepengurusan syuriah, terpilih Syarkawi Wahid, sebagai Ketua Syuriah NU Sumatera Tengah, tokoh yang paling berpengaruh di antara pendiri NU Sumatera Tengah itu. Dalam pemilihan pengurus tanfidziyah, terjadi diskusi yang alot, namun akhirnya, Thoha Maruf, yang juga tokoh penting PERTI (Sekretaris Jendral PERTI), didaulat sebagai Ketua Tanfidziyah NU Sumatera Tengah. Terpilihnya Thoha Maruf, selain sebagai tokoh berpengaruh dan memiliki jaringan yang luas, juga dilatarbelakangi oleh kesamaan asal usul antara Thoha Ma'ruf dengan ketua PB NU masa itu, Idham Khalid, yang sama-sama berdarah Banjar. Untuk posisi sekretaris, dijabat oleh Saridin Sarif. Dari fakta ini, dapat dilihat bahwa bukti lahirnya NU di Sumatera Barat berkaitan dengan organisasi PERTI.

Pendirian NU di Sumatera Tengah ini, mendapat dukungan dari K.H Muslih, tokoh NU asal Jakarta, yang sedang menjabat sebagai Kepala Jawatan Agama Sumatera Tengah masa itu. Pada mulanya, K.H Muslih enggan mengajak orang-orang PERTI untuk menjadi anggota NU. Namun, karena yang berinisiatif untuk mendirikan NU adalah orang-orang PERTI sendiri, akhirnya K.H Muslih mendukung dan merestunya. K.H Muslih kemudian menerima *hujjah* dan pernyataan mereka untuk menjadi bagian dari NU. Dengan demikian tiada lagi halangan untuk mendirikan NU di Sumatera Tengah. Dengan menjadi anggota NU, maka dengan sendirinya mereka tidak aktif lagi di PERTI.

Pada saat yang bersamaan dibentuk pula organisasi pemuda NU, Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor) untuk wilayah Sumatera Tengah (Tanjung, 2017).

Sebelum kepengurusan NU Sumatera Tengah berdiri secara resmi pada 1953, sebenarnya di wilayah Sumatera Barat bagian utara, telah berdiri NU Cabang Rao Mapattunggul sekitar tahun 1950. Meskipun secara wilayah berada di Sumatera Tengah, tetapi karena belum adanya kepengurusan NU wilayah Sumatera Tengah masa itu, membuat NU cabang Rao Mapattunggul dimasukkan ke administratif NU Sumatera Utara, sebagai cabang istimewa. Para pendiri NU cabang Rao Mapattunggul merupakan orang Pasaman beretnis Mandailing dan Minangkabau, yang menuntut ilmu agama di Tapanuli Selatan, sebuah wilayah yang telah lebih awal mengenal organisasi NU, semenjak dekade 1940-an (Siregar, 2011). Tokoh NU Cabang Rao di antaranya adalah Djameluddin Tarigan dan Djabonar Lubis. Hal ini menjadi bukti bahwa relasi antara orang Sumatera Barat dengan NU telah terjalin lama. Setelah NU Sumatera Tengah terbentuk, NU cabang Rao kemudian menjadi bagian dari NU Sumatera Tengah (Firdaus, 2024).

Setelah kepengurusan NU Sumatera Tengah terbentuk, kegiatan yang dilakukan pengurus adalah mendirikan cabang-cabang NU. Thoha Maruf, Saridin Sarif beserta pengurus lainnya, datang ke pelosok-pelosok Sumatera Tengah untuk merintis pendirian cabang NU pada 1953-1954. Di antara wilayah Sumatera Barat yang sering dikunjungi, seperti; Pasaman, Sawahlunto, Lubuk Limpang, Bonjol, Solok, Painan dan daerah lainnya. Sementara Riau dan Jambi yang juga menjadi bagian Sumatera Tengah tidak luput dari kunjungan itu. Akhirnya, NU mulai tumbuh di Sumatera Tengah dengan terbentuknya cabang-cabang (NU Online, 2025)

Setelah NU berdiri di Sumatera Tengah, terdapat sejumlah cabang di berbagai daerah seperti: Bukittinggi, Pasaman, Payakumbuh, Padang, Solok, Sawahlunto, Painan, Pariaman, Jambi, Sungai Penuh, Bangko, Rengat, Bengkalis tahun 1954. NU Sumatera Tengah langsung terlibat dalam percaturan politik lokal. Dinamika pertama di mulai dengan perebutan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST) di antara partai-partai yang ada. DPRST yang telah dibekukan pada tahun 1951, akan dibentuk kembali bersamaan dengan pemilu 1955. Masyumi sebagai partai terbesar waktu itu, mencoba untuk memonopoli pembagian kursi DPRST, yang merupakan perwakilan dari partai politik dan kelompok masyarakat. NU bersama partai lainya yang terdiri dari; Perti, PNI, PSI, PKI lokal Islamy, PPTI, menggalang kekuatan bersama untuk melawan dominasi Masyumi. NU meskipun sebagai partai kecil ikut menunjukkan eksistensinya. Dinamika selanjutnya, NU ikut menentang dan menolak kehadiran Ruslan Mulyoharjo seorang kader Masyumi, sebagai "*acting*" gubernur Sumatera Tengah, yang dikirim dari Jawa. Dan pada 1954, NU bersama partai lainnya kecuali Masyumi, mengadakan pertemuan untuk menjatuhkan Ruslan Mulyoharjo dari kursinya (Feith, 1971: 135)

Menjelang pemilu 1955, sebagai partai baru, NU terus melakukan sosialisasi, dan menambah anggota agar memperoleh suara pada pemilu 1955. Hasil pemilu menunjukan, NU kurang diminati oleh masyarakat Sumatera Tengah. Di tingkat pemilu lokal Sumatera Tengah, NU hanya mampu memperoleh 1% suara dengan jumlah pemilih sebanyak 5.645 orang. Sementara itu, untuk tingkat pusat, NU tidak mampu mengirimkan satu orang pun sebagai wakilnya. Ini berbanding terbalik dengan perolehan suara NU secara nasional, yang mampu memperoleh 45 kursi dan menjadi pemenang ketiga (Zed, 1998).

Adapun para peserta pemilu untuk parlemen/DPR RI, dari partai Nahdlatul Ulama Sumatera Tengah berjumlah 19 orang, yaitu; M. Thoha Ma'roef (Bukittinggi), M. Fachruddin (Jambi), H. Qadri Umar (Rengat), H. Bakri Soeleiman (Lubuk Sikaping), M. Jusuf Sjafei (Bukittinggi), K.H Abdurrani Jasin (Jambi), Kadirun Jahja M. Amin (Bukittinggi), R.H M. Sjarif (Bangko), M.H. Islamil (Rengat), Aziz Manan (Bukittinggi), Ahmad Bermawi (Bukittinggi), Muallim Fithani (Sungai Penuh), A. Moenaf Dt. Sinaro Nan Kasek (Payakumbuh), Ridhwan Baikani (Payakumbuh), Dalal Dt. Sampono Bumi (Bukittinggi), Rosma (Bukittinggi), Burhanuddin Dt. Radjo Sati (Bukittinggi), Djalinus E. Mudo (Sawahlunto), Tenku Zainal Abidin (Bengkalis) (Feith, 1971).

Pada pemilihan anggota konstituante, terdapat 21 peserta dari partai NU Sumatera Tengah. Peserta yang mengikuti pemilihan konstituante dari Partai NU Sumatera Tengah ini terdiri dari; Haji Syarkawi Wahid (Payakumbuh), H. Umar bin H. Abd Samad (Rengat), A. Kadir bin H. Ibrahim (Jambi), H. Abbad Maani ( Payakumbuh), H. Ustads Sjarief (Bukittinggi), Mr. Datuk Djamin (Jakarta), K.H Abdurrani bin H. Jasin (Bukittinggi), Ahmad Chatib Halim (Sungai Penuh), Hadji Sabran Rahmat (Rengat), H. Muhammad Zen Ahmad (Jambi), Djanaib glr. Sutan Batuah (Bonjol/Lubuk Sikaping), H. Muhammad Djadawy (Jambi), K. H Abdul Madjid (Medan), Kms. Abdussamad bin Kms. H. Hasan (Jambi), Abdurrahman Rusly (Padang), H. Abdul Malik (Dangung-dangung/Payakumbuh), Mawin Dt. Tan Bagindo (Solok), Ahmad Sukaini (Sungai Penuh), H. Soleman (Sungai Nopan), H. Ahmad Chatib Mohamad Amin ( Bengkalis), Suhud glr Engku Kuning (Sawahlunto). Dari 21 orang peserta pemilihan Konstituante ini, H. Syarkawi Wahid, Ketua Syuriah NU Sumatera Tengah, terpilih sebagai anggota Konstituante yang bertugas untuk menyusun konstitusi Republik Indonesia. Hasil pemilu 1955 ini, menjadikan NU Sumatera Tengah hanya sebagai sebuah partai kecil (Kementrian Penerangan, 1955).

Dinamika lainnya, setelah pemilu 1955 selesai, polemik tentang pembagian kursi di DPRST kembali mencuat. Pada masa ini, Masyumi sebagai partai pemenang pemilu dan PERTI sebagai pemenang pemilu kedua, bekerjasama dalam memonopoli pembagian kursi DPRST. Akan tetapi, partai lainya menentang pembagian ini, NU bersama PKI dan PNI menjadi penentang yang paling keras. Sikap politik NU, PNI dan PKI ini mengikuti garis yang dijalankan oleh partai-partai tersebut ditingkat nasional, dimana ketiga partai ini berkoalisi dan bersaing dengan partai Masyumi. Setelah terjadinya perundingan alot antara seluruh partai di Sumatera Tengah, akhirnya NU akan memperoleh tiga kursi DPRST. Akan tetapi, DPRST tidak pernah benar-benar terbentuk.

Menjelang 1958, pemerintahan daerah Sumatera Tengah diambil alih oleh "Dewan Banteng" (Asnan, 2007). Dewan Banteng yang diketuai Letkol Ahmad Husein, merupakan suatu dewan yang dibentuk oleh beberapa tokoh militer, yang bertujuan untuk menuntut kesejahteraan prajurit dan menuntut keadilan pembangunan antara daerah dan pusat. Namun, karena tuntutan yang diajukan Dewan Banteng kepada pemerintah tidak diperhatikan, akhirnya mereka mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI kemudian menyebabkan perang saudara yang melelahkan, antara masyarakat Minangkabau pendukung PRRI melawan pendukung pemerintah pusat (Kahin, 2005).

## Sikap Politik NU terhadap Gerakan PRRI

NU Sumatera Tengah adalah partai yang pertama kali mengangkat nama Ahmad Husein ke panggung politik daerah dengan mencalonkannya sebagai Gubernur Sumatera Tengah. Sementara itu, Masyumi tidak memperlihatkan dukungannya ketika hari-hari pertama Ahmad Husein tampil. Dengan mendekati Ahmad Husein, NU telah berhasil meletakkan dasar pijakanya yang relatif kuat di Sumatera Tengah. Langkah partai NU mendukung Dewan Banteng kemudian mengangkat popularitasnya di tengah masyarakat Minangkabau. Padahal, masa sebelumnya, pamor partai ini telah merosot tajam dibandingkan partai kecil lainnya (Asnan, 2007).

Panasnya dinamika politik di tingkat nasional, kemudian membuat tokoh-tokoh Masyumi diikuti tokoh PSI seperti; Syafrudin Prawiranegara, Sumitro Djoyohadikusomo dan lainnya, beralih menjadi pendukung utama PRRI (Kahin, 2005). Sebaliknya, NU Sumatera Tengah juga berbalik arah mendukung pemerintah pusat, mengikuti arahan Pengurus Besar di Jakarta. K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Rais Aam PBNU, masa itu, dalam pidato amanatnya pada sidang pembukaan Mu'tamar Nahdlatul Ulama ke-XXII, di Jakarta, menyampaikan pandangannya tentang PRRI sebagai berikut,

“.....Telah nampak gejala-gejala jang akan membawa kekeruhan di dalam Negeri, ketika mu'tamar di kota Medan sedang berlangsung. Sehingga kita terpaksa menjelesaikan mu'tamar sebelum waktu jang semestinja berachir. Beberapa bulan kemudian berbarlah pemberontakan baru jang menjala di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara.....

Pemberontakan tsb, -saudara2 sekalian-disamping sekian banjak djiwa jang melajang dan disamping sekian djuta harta benda jang menjadi abu, telah memaksakan keuangan Negara kita mengeluarkan pembiajaan beratus-ratus, malahan beribu-ribu djuta rupiah untuk memadamkan api pemberontakan tersebut....

Berkenaan dengan terjadinja pemberontakan bersenjata jang membawa korban tidak sedikit itu, kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menjatakan pendirian dengan hati jang pilu dan dengan penuh penjelasan bahwa tidaklah akan membawa suatu kemaslachatan, di dunia maupun di achirat, apabila seseorang membantu atau memihak kepada pemberontakan tersebut.....” (PBNU, 1959).

Pada forum tertinggi ini, utusan NU Sumatera Barat yang diwakili Nasir Jusuf Dt. R. Bandaro menyampaikan beberapa persoalan NU Sumatera Barat kepada PBNU, antara lain; *pertama*, PBNU kurang mengadakan kunjungan ke daerah-daerah terutama ke daerah Sumatera Barat. *Kedua*, program PBNU lebih banyak baiknya dari pada buruknya, akan tetapi dalam kebaikan itu ada kelalaian. *Ketiga*, tidak terlihat adanya perhatian dari PBNU atas keadaan daerah Sumatera Barat, seolah-olah mereka dianakatirikan. *Keempat*, tidak ada perhatian PBNU terhadap nasib orang-orang NU Sumatera Barat yang menjadi korban gerakan PRRI, hendaknya PBNU, di masa yang akan datang lebih banyak menunjukkan perhatiannya ke bawah. *Kelima*, sikap PBNU terhadap pemberontakan dapat dimengerti akan tetapi rakyat di sana tidak memberontak, melainkan mereka terpaksa terlibat dalam pemberontakan. Dan utusan NU Sumatera Barat ini, meminta penjelasan tentang peranan PBNU terhadap pembangunan di daerah Sumatera Barat, dan sampai dimana pula peranan PBNU dalam penyelesaian keamanan di Sumatera Barat pasca PRRI (PBNU, 1959). Perihal pandangan

NU Sumatera Barat terhadap PBNU ini, Idham Khalid, Ketua PBNU masa itu, menjawab sebagai berikut,

“Saudara dari Padang mengatakan bahwa NU Sumatera Barat tidak pernah dilindungi. Mungkin saudara yang mendjadi utusan itu baru saja pulang beberapa bulan dari Padang. Dimasa yang lewat, kalau ditanyakan kepada Kjai Muslich dan Kjai Abdul Madjid, ada juga dikerdjakan PBNU di sana. Saja kira kalau 100 atau 200 orang yang makan prei bisa dikeluarkan, dan mungkin lebih. Mudah-mudahan ini tidak dimaksudkan oleh Padang untuk mentiadakan sama sekali usaha PB ditiadakanpun, ini semuanya kami perbuat bukan untuk manusia, tetapi semata2 perintah Tuhan, djadi tidak apa! (Sidang ketawa). Tetapi matcam apapun, saudara utusan Padang telah menundjukkan pula kemengertiannya akan situasi, beliau itu masih tetap mempertjajai beleid PBNU, karena tahu dalam keadaan apa dan situasi bagaimana kita berada. Tetapi kalau beliau tidak puas, saja menjatakan, kalau ada orang yang paling tidak puas terhadap beleid ini, maka sajalah orang pertama yang tidak puas, karena sajalah orang yang paling tahu kekurang2 dari beleid saja sendiri! (sidang ketawa)” (PBNU, 1959).

### **Perkembangan NU di Sumatera Barat Pasca PRRI**

Setelah PRRI dapat dikendalikan oleh pemerintah Sukarno. Provinsi Sumatera Tengah yang bergolak dipecah menjadi tiga provinsi, yang terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi, sesuai dengan Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 (Asnan, 2006). Terpecahnya wilayah administratif ini membuat kepengurusan wilayah NU, harus menyesuaikan diri dengan wilayah administratif yang ada. NU Sumatera Tengah pun dipecah menjadi tiga wilayah kepengurusan. Pada November 1959, atas inisiatif beberapa tokoh NU di Sumatera Barat, maka terbentuklah pengurus partai NU Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang.

Adapun susunan pengurus itu yaitu; Kepengurusan Syuriah; H. Silahudin Junus, H. Hasan Arief, H. Rahman Muslim, M Samah Kari Sutan, H ustadz Sjarif, masing-masing sebagai rais, wakil rais, katib dan wakil katib. A’wan; H Malik, H Zen Sajur, H Rasjid Telur, Ustadz Zakaria Ibrahim, H Rahman Rusli, H Jasir Sjafiei, A Aziz Tk Mudo dan A Aziz Aman. Kepengurusan tanfidziyah; KH. A Madjid (Ketua), MH St. Makmur, Nasir Jusuf Dt. R Bandaro (Sekretaris), Joes Oemar SI, Mirza Edipratjino, H Hasan Arief, Zulkifi Murad, M Jacoeb St Madjo Indo, AB Bermawi, Albizar Djalal, Djamil St Kajo, dan Jusuf Nur. Masing-masing sebagai Ketua, Ketua I dan II, sekretaris I dan II, keuangan, perekonomian, dakwah, perburuhan, pertanian, pendidikan, mabarrat, urusan veteran dan urusan pemuda. Beberapa waktu kemudian, banom-banom NU seperti GP Anshor juga telah dibentuk di Sumatera Barat. Kepengurusan cabang NU yang telah ada sebelumnya masa itu, ikut membentuk kepengurusan wilayah NU Sumatera Barat di antaranya: PCNU Kota Padang dengan pengurusnya; Hasan Arif dan Bachtiar Djamil. Cabang lainnya yang telah ada masa itu, PCNU Payakumbuh dengan pengurusnya; H M Zein Sajon (Ketua), Datuk Putcuk, Ruslan Sjamsunar, Tuanku Alam. PCNU Padang Pariaman dengan pengurusnya; T Sutan Ibrahim, Sd Djarun Guru, Rasjidi Rasjid, dan PCNU Bukittinggi (Harian Duta Masyarakat, 1959).

Pada awal 1960-an, ketika Sukarno menerapkan Demokrasi Terpimpin, secara perlahan NU kembali mengeliat, setelah diam selama masa PRRI. Masa ini, salah satu instrumen yang digunakan untuk mengembangkan NU yaitu Departemen Agama. Pada masa Orde Lama para pegawai negeri masih diperbolehkan berpolitik praktis. Salah

satu tokoh dari Departemen Agama yang ikut merintis NU di Sumatera Barat adalah H. Mansur Datuk Nagari Basa. Ia adalah Ketua Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama) Sumatera Tengah 1958-1960 dan memiliki kedekatan dengan Saifudin Zuhri, tokoh NU yang menjadi Menteri Agama 1962-1967. H. Mansur juga merupakan seorang ulama PERTI dan pernah menjadi anggota konstituante mewakili PERTI (Kurniawan et.al, 2025)

Keberhasilan instrumen ini, menyebabkan para pegawai, birokrat, dan guru-guru yang berada dibawah Departemen Agama menjadi berminat menjadi anggota NU. Contohnya, kepala Sekolah PGAN 6 tahun Padang, H. Nurmana Zikri. Sekolah ini, menjadi basis organisasi pelajar NU (IPNU), yang di antara kader-kadernya yaitu Zainal MS dan Maidir Harun (Harun, 2020). Pada bidang politik, NU Sumatera Barat ikut berperan dalam dinamika sosial politik di daerah ini. Contohnya ketika NU mampu menempatkan seorang wakilnya di DPRD-GR Sumatera Barat, dan beberapa orang di DPRD-GR tingkat kabupaten. Pada masa ini anggota NU terus bertambah karena kedekatannya dengan pemerintah Sukarno. Selain itu, beberapa orang yang terduga terlibat dalam PRRI mencoba melindungi dirinya dengan menjadi NU (Tanjung, 2022). Setelah Masyumi sebagai partai terbesar di Sumatera Barat dibubarkan, peta politik di daerah masih dikuasai oleh PKI dan juga PERTI. NU masih belum mampu mengimbangi peran dari kedua partai itu (Asnan, 2006).

Pada 1966, berbagai unsur pemerintahan dan militer secara perlahan dibersihkan dari unsur PKI yang telah lama menyusup di sana. Kemudian DPRD-GR dibentuk dan NU memperoleh empat kursi di DPRD-GR Sumatera Barat. Adapun empat orang yang mewakili NU, yaitu; Amiruddin (Padang), M. Yusuf (Ujung Gading, Pasaman), Rajudin Noeh, dan H. Latif. Keempat orang NU tersebut aktif dalam DPRD-GR sampai terbentuknya DPRD hasil pemilu, lima tahun setelahnya (Tanjung, 2022). Kiprah politik NU lainnya yaitu dapat mengantarkan Harun Zain menjadi Gubernur Sumatera Barat, pada tahun 1966, dan pencalonan Harun Zain ini, salah satunya diusulkan oleh Abdul Aziz Shaleh, pengurus NU Sumatera Barat masa itu (Yusra, 1997). Kurun waktu dekade 1960-an, masa Orde Lama, merupakan masa mulai tumbuhnya NU di Sumatera Barat. Selain anggotanya terus bertambah, cabang-cabang NU telah ada di seluruh daerah Sumatera Barat, bahkan beberapa pengurus ranting di beberapa daerah juga telah terbentuk dan badan-badan otonomnya juga aktif.



Gambar 1. Kartu Anggota Partai NU, Ranting Rumbio, Pasaman, 1962 (Dokumen Penulis)

Kurun 1960-an, kader-kader NU juga mampu memperoleh kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten. Badan-badan otonomnya juga aktif seperti; Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), yang berkembang disekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) organisasi mahasiswa NU yang terlibat dalam gerakan mahasiswa di Sumatera Barat dan ikut menuntut pembubaran PKI, Muslimat NU sebagai wadah perjuangan perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) sebagai wadah para buruh yang terafiliasi dengan NU yang terlibat dalam perjuangan membela kesejahteraan kaum buruh dan pekerja.

Pada masa Orde Lama ini, para tokoh-tokoh asal Sumatera Barat telah ada yang menjadi tokoh penting di PBNU. Di antara tokoh itu di antaranya Djamaludin Malik, yang menjadi ketua III PBNU (PBNU, 1959). Selain Djamaludin, tokoh Minang lainnya seperti Usmar Ismail seorang tokoh perfilman asal Bukittinggi, serta Asrul Sani, penyair angkatan 45 asal Rao juga menjadi pendiri sebuah lembaga kebudayaan dibawah naungan PBNU, yang bernama Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (LESBUMI). Kelahiran Lesbumi merupakan reaksi terhadap organisasi kebudayaan masa itu yang terpengaruh politik aliran, seperti LEKRA yang menjadi corong dari Partai Komunis Indonesia (PKI) (Sjamsu, 1939).

## **Kesimpulan**

Dinamika politik di Sumatera Tengah pada dekade 1950-an tidak dapat dilepaskan dari ketegangan antara pemerintah pusat dan elit daerah yang berkembang pada masa demokrasi liberal. Ketidakpuasan terhadap kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat, terutama terkait distribusi sumber daya dan pembangunan daerah, melahirkan berbagai gerakan politik regional, termasuk Dewan Banteng yang kemudian berkembang menjadi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958. Peristiwa ini tidak hanya memicu konflik politik dan militer, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan politik masyarakat di daerah, termasuk organisasi-organisasi keagamaan. Nahdlatul Ulama (NU) di Sumatera Tengah muncul sebagai salah satu organisasi yang turut terlibat dalam dinamika politik lokal. Kehadiran NU di wilayah ini pada awal 1950-an diprakarsai oleh sejumlah tokoh yang sebagian besar berasal dari lingkungan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). NU tetap berupaya memperluas jaringan melalui pembentukan cabang-cabang di berbagai daerah di Sumatera Tengah serta terlibat dalam dinamika politik lokal menjelang Pemilu 1955.

Pada awalnya, NU memiliki kedekatan politik dengan tokoh militer Ahmad Husein melalui dukungannya terhadap Dewan Banteng. Ketika konflik berkembang menjadi pemberontakan terhadap pemerintah pusat, NU Sumatera Tengah mengikuti garis kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menolak gerakan PRRI. Setelah konflik PRRI berhasil dikendalikan oleh pemerintah pusat, terjadi perubahan struktur administratif wilayah dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi pada tahun 1958. Perubahan tersebut diikuti dengan reorganisasi kepengurusan NU di tingkat wilayah. Pada periode setelah PRRI, khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin, NU di Sumatera Barat mulai menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah anggota, terbentuknya berbagai cabang dan ranting organisasi, serta keterlibatan NU dalam berbagai lembaga politik dan pemerintahan daerah. Selain itu, perkembangan NU di Sumatera Barat juga

didukung oleh aktivitas berbagai badan otonom seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Muslimat NU, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi).

### Daftar Pustaka

- Asnan, G. 2006. *Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Dari VOC hingga Reformasi*. Citra Pustaka.
- Asnan, G. 2007. *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cindy Lorenza, B, Fikri, A. (2024). PRRI Suppression Operation in Sungai Pagar (1958-1961): Operasi Penumpasan PRRI di Sungai Pagar (1958-1961). *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 1061-1066. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3819>
- Fealy, G. 2003. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. LKiS
- Feith, H. 1971. *The Indonesian Election Of 1955: Interim Report Series*. Cornell University
- Harian "Duta Masyarakat". *Rubrik Kronik Harian Duta Masyarakat*. 1 Desember 1959
- Harun, M. 2020. *70 tahun Prof. Dr. Maidir Harun: Lika-liku kehidupan anak seorang petani Lubuak Aluang*. Sekata Cendikia.
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartu Anggota NU*, Ranting Rumbio, Pasaman, 1962
- Kementerian Penerangan RI. 1955. *Kumpulan Peraturan-Peraturan untuk Pemilihan Konstituante*.
- Koto, A. 2012. *Persatuan Tarbiyah Islamiyah*. Rajawali Pers
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kurniawan, S.V., Hamid, A.R., & Hasanah, U. (2025). Negara Islam ala Indonesia: Pemikiran Perti di Konstituante, 1956-1959. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 9(3) 392-409. <https://doi.org/10.29408/fhs.v9i3.31749>
- Leirissa. R.Z. 1997. *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Pustaka Utama Grafiti.
- Marijan, K. 1992. *Quo Vadis NU setelah Kembali ke Khittah 1926*. Erlangga.
- Noer, D. 1987. *Partai-partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Graffiti Press.
- PBNU. (1959). *Buku Kenang-kenangan Muktamar Ke-XXII Partai Nahdlatul Ulama*. PBNU.
- Siregar, S. 2011. *Nahdlatul Ulama (NU) di Medan: Studi Tentang Sejarah dan Peran Sosial Keagamaan Dari 1950-2010*. Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sjamsu, N. 1971. *Heboh Sastra 1968 Menuju Titik Kebenaran*. Pustaka Sa'adijah
- Tanjung, A. 2017. *Berkhidmat untuk NU di Ranah Minang 1994-2014*. Pustaka Artaz.
- Tanjung, A. 2019. *Tokoh NU Dari Sumatera Barat*. Pustaka Artaz.
- Van Bemmelen, S., Raben, R (ed). 2011. *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.
- Wiyatmi, W. W. (2013). Representasi Sejarah Indonesia dalam Novel-novel Karya Ayu Utami. *Litera*, 12(2), 209-223. <https://doi.org/10.21831/ltr.v12i02.1545>

- Yusra, A. 1997. *Tokoh yang berhati rakyat: Biografi Harun Zain*. Yayasan Gebu Minang
- Zed, M. (2014). Sentralisme dan Perlawanan Daerah: Dialektika Sejarah Perjalanan Bangsa Pasca Kolonial 1945-2005. *Jurnal Tingkap*, 10 (2).
- Zed, M., Chaniago, H. (1999). PRRI dalam Perspektif Militer dan Politik Regional: Sebuah Reinterpretasi. *Jurnal Studi Amerika IV*, (Januari Juli): 122.
- Zed, M., et.al. 1998. *Sumatera Barat Di Panggung Sejarah 1945-1995*. Pustaka Sinar Harapan.

#### Internet

NU Online, diakses pada juni 2025 melalui <https://www.nu.or.id/>

#### Daftar Informan

Firdaus, *wawancara pribadi*, 2025

Khusnun Aziz, *wawancara pribadi*, 2025

Zainal MS, *wawancara pribadi*, 2025